



STRATEGI PENGEMBANGAN KREATIVITAS ASN UNTUK MENCIPTAKAN MINDSET INOVASI

Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D

**Staff Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Kemenkeu RI &
Guru Besar FEB-UB**



01

Visi Pembangunan Indonesia 2045

02

Peran Kunci APBN dalam Mendorong
Akselerasi Transformasi Ekonomi

03

Tata Kelola Pemerintahan Untuk
Mencapai dalam mengembangkan
inovasi



INDONESIA 2045: MENJADI NEGARA MAJU

Mewujudkan Indonesia “Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”

INDONESIA

2045

Bercita-cita menjadi negara High-Income

Indonesia as one of the world's economic centre of gravity
- **OECD, 2018**

If Indonesia can quickly return to prepandemic growth rates, the country may become the world's seventh-largest economy by 2030.
- **McKinsey, 2021**

If Indonesia stays on this path for the next decade, the country could become one of the world's ten biggest economies.
- **The Economist, 2022**

DEMOGRAFI



319
Juta penduduk

47%
Umur produktif

73%
Hidup di perkotaan

75,5 thn
Angka harapan hidup

EKONOMI



Ke-5
Perekonomian terbesar di dunia

>65%
Peranan sektor jasa bernilai tambah tinggi

71%
Berpenghasilan menengah

US\$23.199
Pendapatan per kapita

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DIARAHKAN UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN



Strategi pembangunan kewilayahan dilakukan melalui optimalisasi keragaman potensi masing-masing wilayah dengan penguatan infrastruktur, kualitas hidup SDM, produktivitas sektor, dan resiliensi terhadap bencana

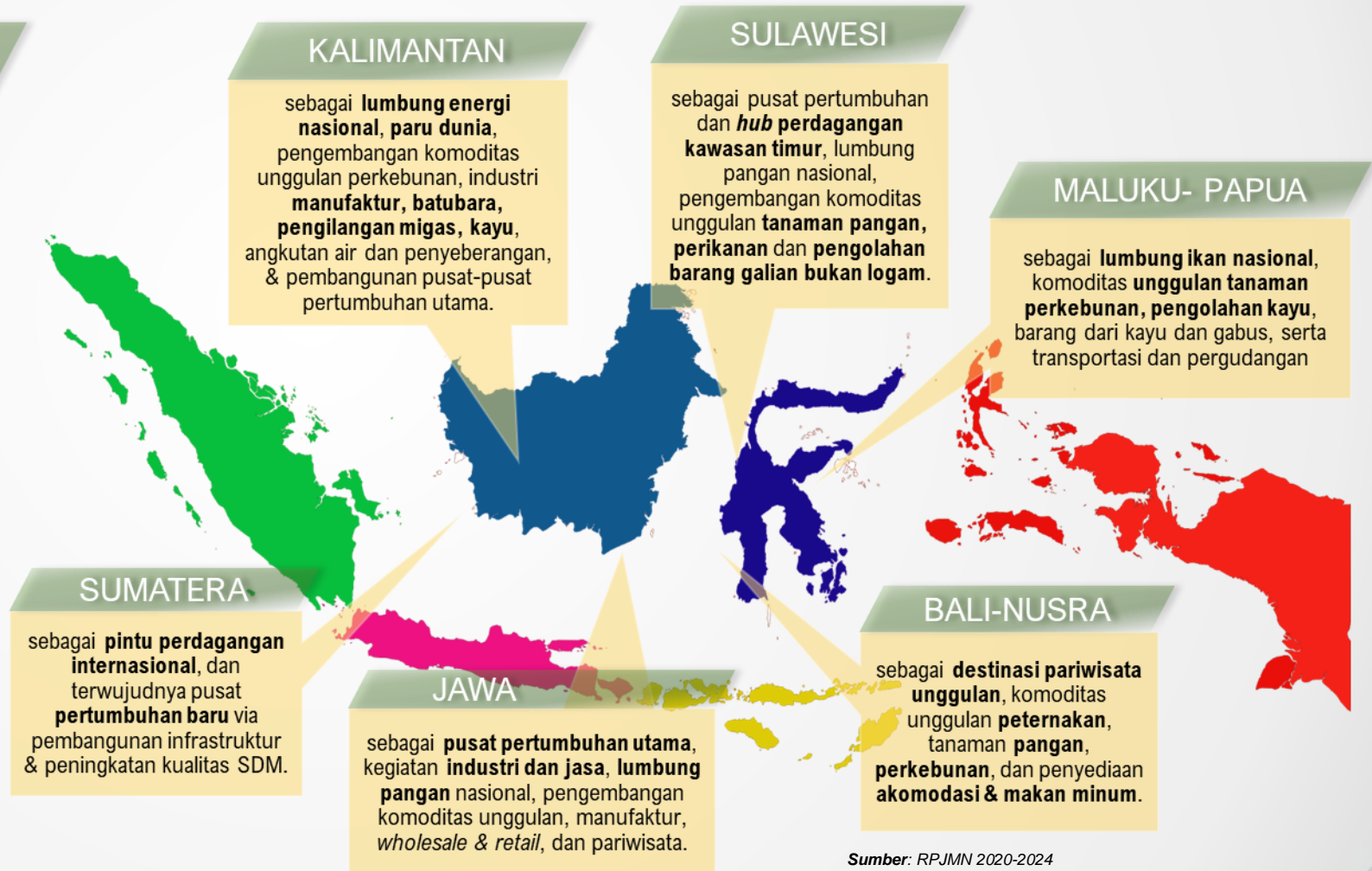
RPJMN 2020-2024 Arah Pembangunan Kewilayahan

1 Meningkatkan pemerataan antarwilayah antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia dan antara Jawa dengan Luar Jawa

2 Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan di wilayah

3 Meningkatnya kualitas & akses pelayanan dasar, daya saing, dan kemandirian daerah

4 Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah



Sumber: RPJMN 2020-2024

URGENSI KESINAMBUNGAN TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI IMPLEMENTASI AGENDA REFORMASI STRUKTURAL



TRANSFORMASI EKONOMI

Proses perubahan berkesinambungan untuk memperkuat bangunan ekonomi nasional

Dari aktivitas ekonomi berbasis produktivitas rendah ke produktivitas tinggi

Dari aktivitas ekonomi berbasis nilai tambah rendah ke nilai tambah tinggi,

Dari aktivitas ekonomi berbasis komoditas mentah yang *volatile* ke aktivitas hilirisasi yang stabil dan resilien

Dari aktivitas ekonomi yang *narrow-based* ke arah yang lebih *broad-based* dan inklusif

Aktivitas ekonomi yang *polluted* ke *greener economy*

REFORMASI STRUKTURAL

Kunci mewujudkan dan mempercepat transformasi ekonomi, melalui proses yang berkesinambungan mengatasi berbagai *binding constraints* dan mengoptimalkan peluang dan sumber daya

Objektif

Produktivitas yang lebih tinggi

Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas

Pertumbuhan berkelanjutan

INDONESIA MEMILIKI ASET KUNCI MENDORONG PENGUATAN POTENSI PEMBANGUNAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI



Sumber Daya Manusia

Angkatan kerja yang besar, terbesar di ASEAN, bonus demografi

Modal Fisik

Pembangunan infrastruktur secara masif dalam 10 tahun

Sumber Daya Alam

SDA yang berlimpah, sumber daya mineral yang banyak, terbesar kedua luasan hutan tropis dan gambut

Modal Sosial

Negara dengan keanekaragaman identitas dan social capital yang kuat

Isu/Potensi Struktural	Visi	Intervensi Pemerintah	Reformasi ke depan
<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pendidikan dan kesehatan masih tertinggal dibandingkan EMs <i>peers</i> Kualitas tenaga kerja terbatas (penganggur muda dan low) tingginya <i>informal labor</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Angkatan kerja yang unggul (<i>high-skilled</i>) dan sehat sebagai prasyarat untuk menjadi negara maju Penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, dan inisiatif inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> Reformasi pelayanan kesehatan, anggaran pendidikan (termasuk Kartu Prakerja, LPDP), perlintas UU Cipta Kerja (Bag. Tenaga Kerja) UU P2SK (Reformasi pensiun) Labor management information system (Kemenaker) 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem dapat menstimulasi inovasi Keberlanjutan reformasi sistem pendidikan Ekosistem riset (R&D) yang kuat dan kondusif
<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur konektivitas perlu terus dikembangkan Ruang perbaikan sistem logistik masih terbuka Perbaikan sistem TIK dengan orientasi masa depan 	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur memadai, berdaya saing, terintegrasi (konektivitas, pelayanan dasar, sistem logistik) Infrastruktur TIK yang tersebar merata sebagai katalisator aktivitas ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek prioritas UU Cipta Kerja (kemudahan investasi, OSS) UU P2SK (pembiayaan jk. panjang melalui reformasi pasar modal) 	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan deregulasi kemudahan berusaha Mengedepankan pembangunan berorientasi hijau Peningkatan peran swasta Keberlanjutan hilirisasi SDA
<ul style="list-style-type: none"> Indonesia termasuk aera yang rentan akan perubahan iklim Potensi industri hijau yang sangat besar (\$100-125 miliar per tahun di 2030, McKinsey) Arah investasi global mulai mengedepankan sustainability 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan ekonomi yang didekarbonisasi. Mempercepat target <i>Net Zero Emission</i> pada tahun 2060 	<ul style="list-style-type: none"> Moratorium izin perusahaan hutan dan penanaman mangrove Harga karbon dan pajak karbon UU energi terbarukan Komitmen Energy Transition Mechanism 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pasar karbon Mendorong green financing Memberikan insentif permintaan produk ramah lingkungan Mendorong riset (R&D) terkait ekonomi hijau
<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepercayaan publik yang masih terbatas Masih perlunya pengembangan <i>community-based development</i> untuk sektor/daerah potensial 	<ul style="list-style-type: none"> Kolaborasi yang kuat antara pemerintah-masyarakat Pengembangan industri yang mencakup potensi kedaerahan Pemanfaatan negara populasi muslim terbesar sebagai pusat industri halal dunia 	<ul style="list-style-type: none"> UU KUHP Implementasi penggunaan digital layanan pemerintah Transparansi diskusi kebijakan, termasuk dokumentasi data Stimulus pengembangan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan reformasi birokrasi dengan digitalisasi Perbaikan pengadaan barang publik Pengembangan integrasi kerjasama UMKM-korporasi Dorongan industri halal

BERBAGAI TANTANGAN PEMBANGUNAN JUGA PERLU DIATASI UNTUK Mendukung TRANSFORMASI EKONOMI DAN MEWUJUDKAN VISI INDONESIA MAJU 2045



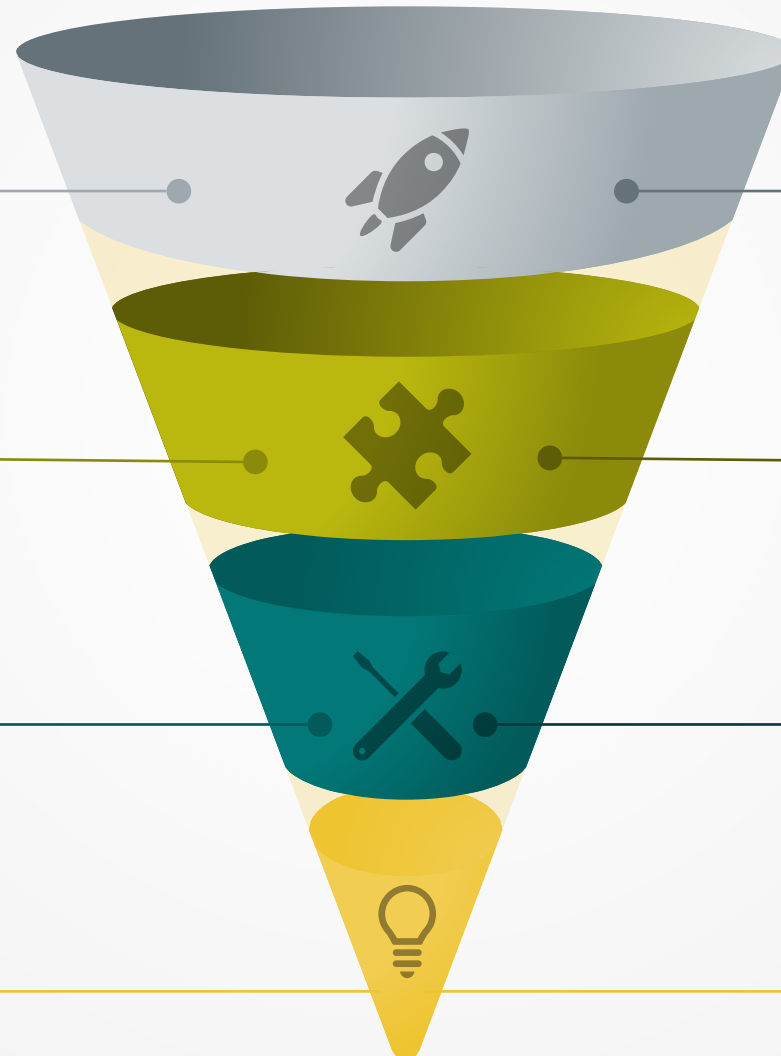
TANTANGAN GLOBAL

DISRUPSI SUPLAI MASIH TERJADI

TEKANAN INFLASI MASIH TINGGI

KEBIJAKAN MONETER KETAT DI
BANYAK NEGARA

PERLAMBATAN PERTUMBUHAN
GLOBAL



TANTANGAN DOMESTIK

PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
YANG MENURUN

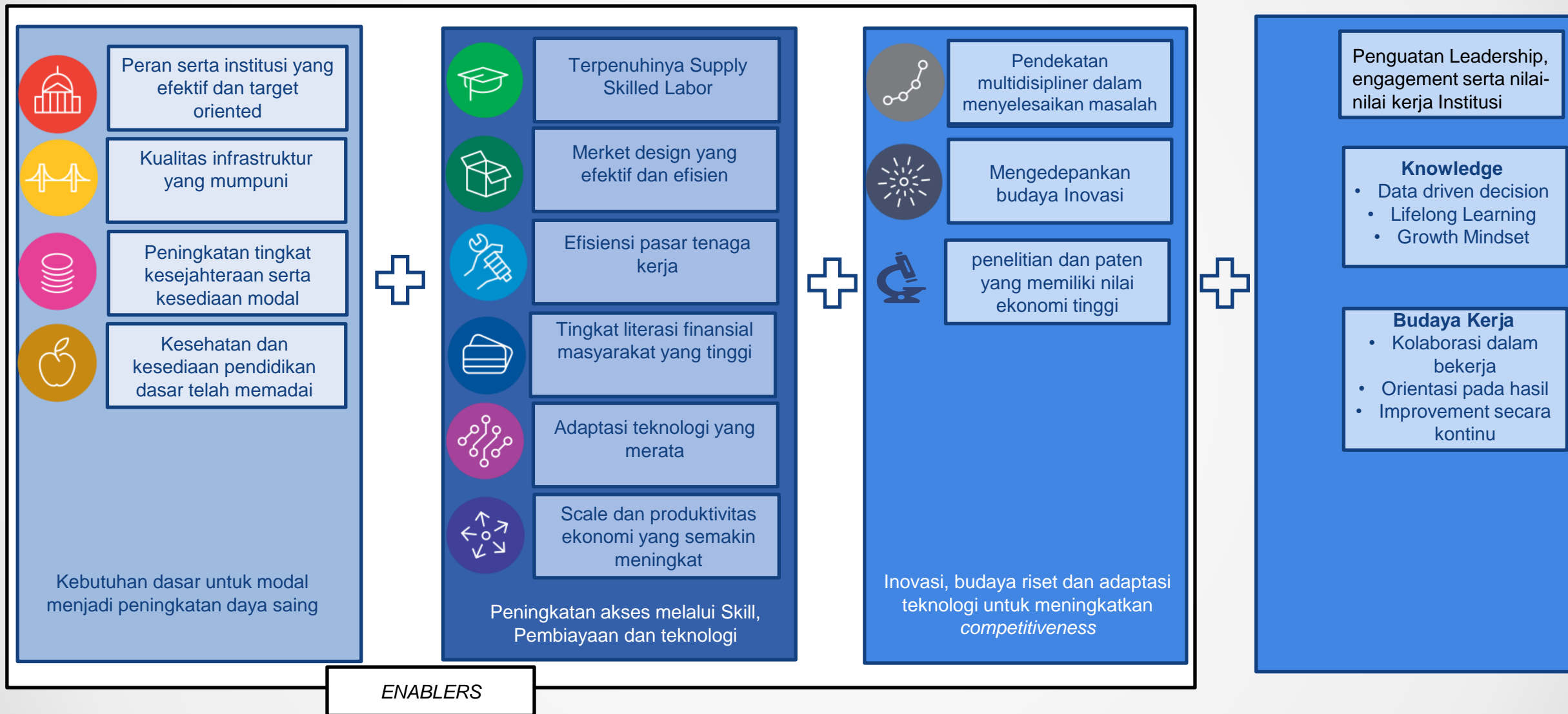
KONTRIBUSI GLOBAL VALUE
CHAIN YANG RELATIF RENDAH

PERAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG
MENURUN

PRODUKTIVITAS RELATIF RENDAH

PENTINGNYA INOVASI DI DALAM SUATU ENTITAS

Inovasi merupakan *enablers* untuk meningkatkan peradaban yang lebih maju dan dukungan dalam era kompetisi global





01

Visi Pembangunan Indonesia 2045

02

**Peran Kunci APBN dalam Mendorong
Akselerasi Transformasi Ekonomi**

03

Tata Kelola Pemerintahan Untuk
Mencapai dalam mengembangkan
inovasi



KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023



TEMA

“Transformasi Ekonomi Mendorong Pertumbuhan Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan”

ARAH KEBIJAKAN FISKAL



Peningkatan Kualitas SDM

(Pendidikan, Kesehatan, Perlinsos)



Percepatan Pembangunan Infrastruktur

(Infrastruktur dasar, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (al.konektivitas, ICT))



Penguatan Reformasi Birokrasi

(*Right sizing* organisasi dan personil pemerintahan, digitalisasi layanan publik, penguatan *e-office*)



Revitalisasi Industri

(Mendorong hilirisasi komoditas, memperkuat basis ekspor dan pengembangan industri baru bernilai tambah tinggi)



Pembangunan Ekonomi Hijau

(Adaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, pengembangan pembiayaan berkelanjutan)

APBN MEMILIKI PERAN KRUSIAL UNTUK MENDUKUNG REFORMASI STRUKTURAL DALAM RANGKA AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI



MEMFASILITASI REFORMASI STRUKTURAL melalui Reformasi Fiskal



AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (konektifitas, logistik, aktifitas digital)



MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU (ETM, Sustainable Finance, Pasar Carbon)



PENGUATAN KUALITAS MODAL MANUSIA (Pendidikan, kesehatan dan Perlinsos)



PENGUATAN INSTITUSIONAL (reformasi birokrasi, deregulasi, iklim investasi yang kompetitif)

REFORMASI SEKTOR KEUANGAN BAGIAN INTEGRAL DARI REFORMASI STRUKTURAL Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi



Sektor keuangan menghadapi disrupsi teknologi yang semakin masif serta kesadaran baru atas Environment, Social & Governance (ESG)

TANTANGAN

- Rendahnya literasi keuangan & ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau
- Tingginya biaya transaksi di sektor keuangan
- Terbatasnya instrumen keuangan
- Kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan
- Rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen

Reformasi Sektor Keuangan



Penguatan dan Pendalaman layanan jasa keuangan

Penguatan Koordinasi pengembangan jasa layanan keuangan, kerangka penanganan permasalahan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

SASARAN

- Meningkatkan Akses ke Jasa Keuangan
- Memperluas Sumber Pembiayaan Jangka Panjang
- Meningkatkan Daya Saing & Efisiensi
- Mengembangkan instrumen dan Memperkuat Mitigasi Risiko
- Meningkatkan Perlindungan Investor & Konsumen

PENGUATAN REFORMASI FISKAL JUGA DILAKUKAN UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN FISKAL AGAR MAMPU MENDUKUNG REFORMASI STRUKTURAL



1

MOBILISASI PENDAPATAN

- Menjaga **efektivitas Reformasi Perpajakan (UU HPP)**;
- Inovasi penggalan potensi untuk **peningkatan *tax ratio***
- Sistem perpajakan yang **sejalan dengan struktur perekonomian**
- **Optimalisasi pengelolaan aset** dan inovasi layanan

2

PENGUATAN *SPENDING BETTER*

- Mendorong ***wise spending*** (*perilaku belanja secara bijak sesuai kebutuhan*):
 - ✓ Efisiensi belanja bersifat rutin;
 - ✓ Fokus program prioritas;
 - ✓ Berorientasi pada hasil (*result based*);
- Melanjutkn reformasi subsidi yang efektif dan tepat sasaran
- Efektivitas perlinsos (akurasi data dan integrasi atau sinergi program)
- Sinergisitas dan kolaborasi serta *Quality control* TKD

3

PEMBIAYAAN INOVATIF & SUSTAINABLE

- Mendorong **pengembangan skema KPBU yang sustainable lebih massif**
- Mendorong efektivitas pembiayaan investasi a.l pemberian PMN ke BUMN **dilakukan secara selektif**
- Pendalaman pasar (*financial deepening*)
- **Penguatan peran SWF dan SMV**;

3

PENGUATAN DAYA TAHAN & MITIGASI RISIKO YANG KOLABORATIF

- Mempersiapkan **buffer untuk antisipasi uncertainty**
- Penguatan **fleksiilitas fiskal**;
- Penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang handal dan efisien;
- **Penguatan kolaborasi dan sinergisitas** antara kebijakan fiskal. Moneter, ssektor keuangan ddaan Pemda

APBN BERPERAN PENTING DALAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI AGENDA REFORMASI STRUKTURAL MELALUI Penguatan Kualitas Modal Manusia dan Infrastruktur



Fokus Reformasi

	APBN 2023
Belanja Negara (Rp Triliun)	3.061,2
% PDB	14,53
Pendidikan (Rp Triliun)	612,2
% PDB	2,9
Kesehatan (Rp Triliun)	178,7
% PDB	0,85
Perlinsos^{*)} (Rp Triliun)	476,4
% PDB	2,3
Infrastruktur (Rp Triliun)	392,0
% PDB	1,9
Asumsi:	
Pertumb. ekonomi (%)	5,3
Inflasi (%)	3,6
PDB Nominal (Rp Triliun)	21.061,7

Momentum melaksanakan penguatan Reformasi struktural untuk akselerasi transformasi ekonomi:

- 1) fokus program prioritas
- 2) *quality control* terhadap hasil yang solid
- 3) harus menghasilkan ketangguhan ekonomi, sosial, dan fiskal yang jauh lebih baik

Fokus untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing (PAUD, *link & match*, akses, pemerataan & kompetensi guru serta meningkatkan skor PISA)

Akselerasi reformasi menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal (efektivitas Program JKN serta penguatan *health security preparedness*)

Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan handal (integrasi data dan program & perlinsos yang adaptatif (jaring pengaman sosial untuk *automatic stabilizer*), transformasi Subsidi LPG & Listrik RT ke Bansos

Infrastruktur pendukung mobilitas, konektivitas & produktivitas, dan IKN, serta melanjutkan PSN (ICT, energi, konektivitas, pangan dan urban *development* (perumahan, sanitasi, transportasi massal perkotaan)

REFORMASI MEMBUTUHKAN KOLABORASI DAN KOMITMEN BERSAMA

Jaga Komitmen

Hindari ego sektoral

Hindari *Moral Hazard*

Kontrol Hasil

*) APBN 2021 Rp408,8 T (jika menampung tambahan Program PEN menjadi Rp470,4 T)

SDM UNGGUL MENJADI KUNCI UNTUK AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI

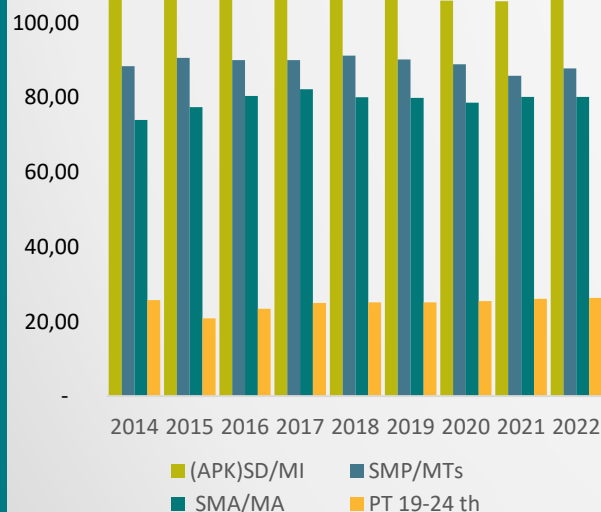


mewujudkan SDM yang produktif, inovatif, berintegritas dan sejahtera

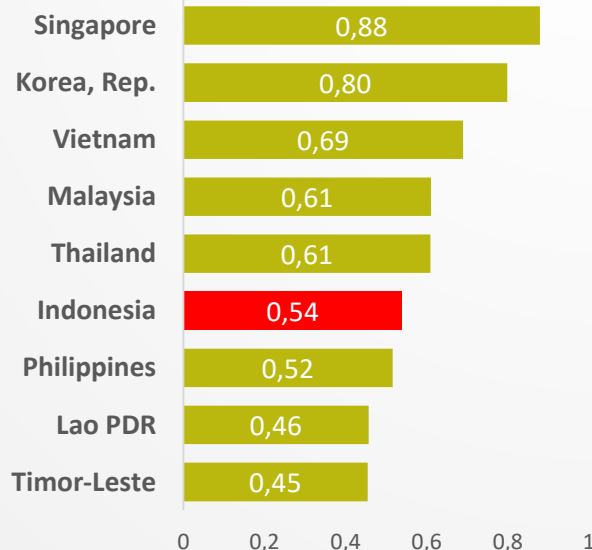
PENDIDIKAN

- Indikator pendidikan (APK) tinggi dalam 10 tahun terakhir untuk jenjang pendidikan SD-SMP, tapi tantangan APK jenjang pendidikan menengah ke atas
- HCI Indonesia relatif rendah dibanding peers, tantangan semakin berat dalam meningkatkan PISA Score (ranking 2018: 74 dari 79 negara)
- Perlu upaya reformasi pendidikan untuk mengatasi *learning loss* akibat pandemi

Perkembangan APK



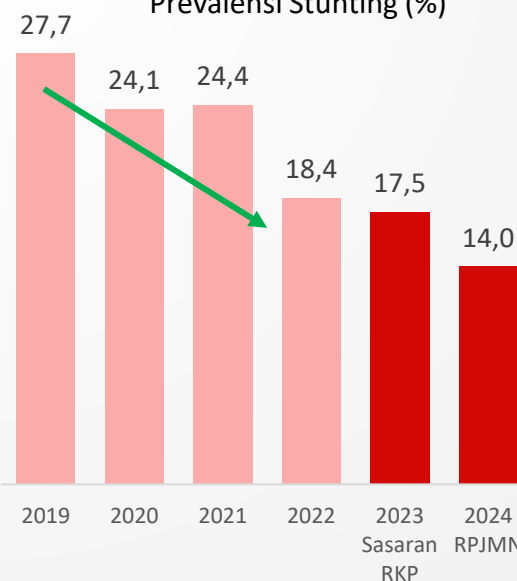
Perbandingan HCI



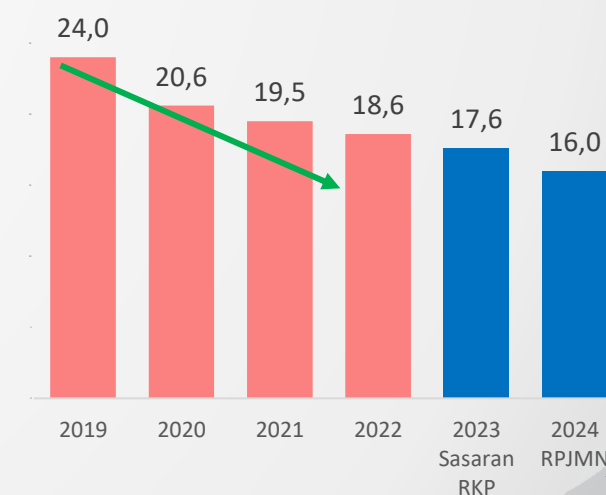
KESEHATAN

- Capaian indikator kesehatan menunjukkan perbaikan namun perlu diakselerasi, al. prevalensi stunting dan angka kematian bayi
- Perbaikan indikator kesehatan mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19
- Transformasi sistem kesehatan terus diakselerasi untuk pencapaian target RPJMN

Prevalensi Stunting (%)



Angka Kematian Bayi (AKB) (per seribu kelahiran hidup)



TANTANGAN PEMBANGUNAN YANG PERLU DIRESPON MELALUI KEBIJAKAN FISKAL YANG EFEKTIF



Scaring Effect dan *Living With Endemic*



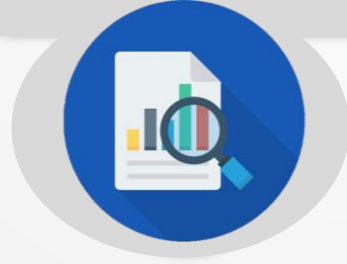
- Sistem kesehatan yang **handal**;
- Perlinsos yang **adaptif**;
- **Sistem keuangan yang compatible**
- **Fiskal yang responsive dan adaptif**



Perekonomian Global yang masih diliputi *uncertainty*



- Kebijakan fiskal yang **resilience dan agile**;
- Kebijakan yang **kolaboratif** (fiskal, moneter dan sektor keuangan serta daerah);
- Kebijakan sektoral yang **sinergis**



Masalah Struktural (SDM, Infrastruktur, birokrasi)



- **Melanjutkan reformasi struktural** (*human capital, physical capital dan institutional reform*).
- Mendorong **efektivitas reformasi fiskal** (UU HPP, UU HKPD, UU P2SK)



Demografi, SDA dan Perubahan Iklim



- Memanfaatkan bonus demografi untuk **dorong produktivitas dan daya saing**;
- Mendorong **hilirisasi SDA** (CPO, Batubara, Nikel, Bouksit);
- Mendorong **transisi energi yang ramah lingkungan**



TANTANGAN : PENERAPAN BUDAYA INOVASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING

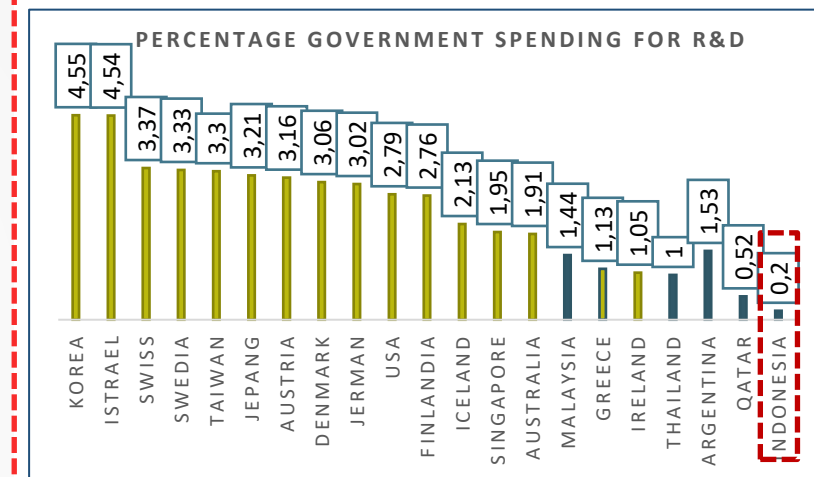
Berdasarkan global innovation index Indonesia hasil peringkat Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui budaya berinovasi di berbagai lini

Negara	GII Rank Global	Negara	GII Rank Region
Swiss	1	Korea Selatan	1
USA	2	Singapore	2
Swedia	3	China	3
UK	4	Japan	4
Belanda	5	Hongkong	5
Georgia	74	Mongolia	12
Indonesia	75	Indonesia	13
Jamaica	76	Brunei	14
Belarus	77	Cambodia	15
Yordania	78	Laos	16

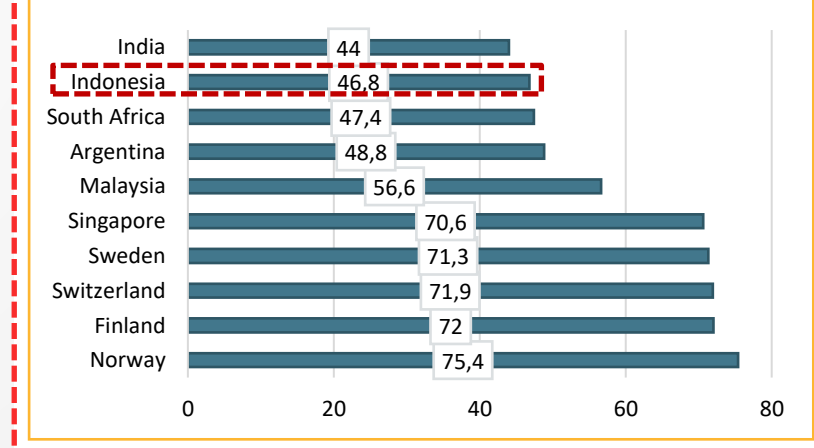
Summary

- Apabila ditinjau dari daya inovasi global, Indonesia masih menduduki peringkat 75 dari 132 negara (dirilis Global Innovation Index 2022 - INSEAD). Di **Region Southeast asia, East Asia, and Oceania**, Indonesia juga menduduki **peringkat 13**.

PENINGKATAN R&D MASIH PERLU DITINGKATKAN



Global Infrastructure Index - 2019



Kurikulum yang mengedepankan **entrepreneurial skills/job creation**



Membangun environment creative work, strategic thinking untuk menghadapi tantangan



Peningkatan kemudahan **iklim usaha, deregulasi, serta stabilitas politik dan ekonomi**



Dukungan terhadap peningkatan **infrastruktur fisik dan non fisik**



Meningkatkan alokasi anggaran dan insentif untuk R&D disamping peningkatan partisipasi sector privat

Perbaikan perlu dilakukan melalui 5 Pilar

SISTEM MANAJEMEN ASN

Mendukung tata kelola ASN yang **kolaboratif** serta mengurangi tumpang tindih kewenangan Manajemen ASN

PENEGAKAN TATA KELOLA MANAJEMEN ASN

- Efisiensi Anggaran dan waktu dengan menggunakan
- Penataan aspek kelembagaan untuk mewujudkan **tata Kelola yang transparansi akuntabel**

KOMPETENSI, PELAYANAN SERTA DISTRIBUSI ASN

- Menerapkan implementasi **standar pelayanan minimum** di setiap daerah
- Penyebaran ASN berdasarkan kebutuhan pembangunan di setiap daerah
- Pelayanan yang **efisien dan efektif**

DATABASE DAN SISTEM INFORMASI ASN

- Mengembangkan database ASN (Big Data ASN).
- Upaya **integrasi database** Kementerian teknis dengan BKN
- Pengambilan keputusan berdasarkan database terintegrasi



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

01

Visi Pembangunan Indonesia 2045

02

Peran Kunci APBN dalam Mendorong
Akselerasi Transformasi Ekonomi

03

**Tata Kelola Pemerintahan Untuk
Mencapai dalam mengembangkan
inovasi**

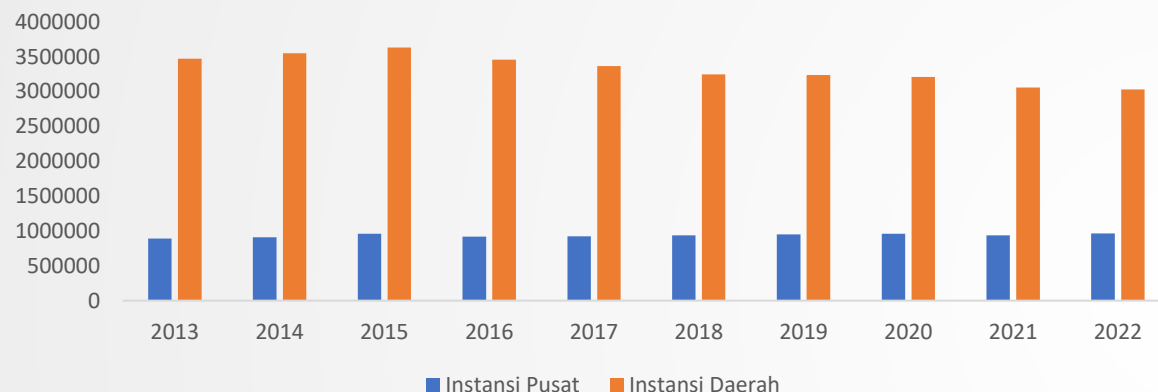


PERKEMBANGAN ASN RELATIF BELUM OPTIMAL

10 tahun terakhir, masih banyak terdapat ketimpangan ASN baik dari segi instansi pusat-daerah, dan tingkat pendidikan

Per 30 Juni 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi pusat dan instansi daerah adalah 4.344.552 dengan rincian jumlah PNS 3.992.766 (92%) dan 351.786 (8%) untuk PPPK

Porsi ASN Pusat-Daerah

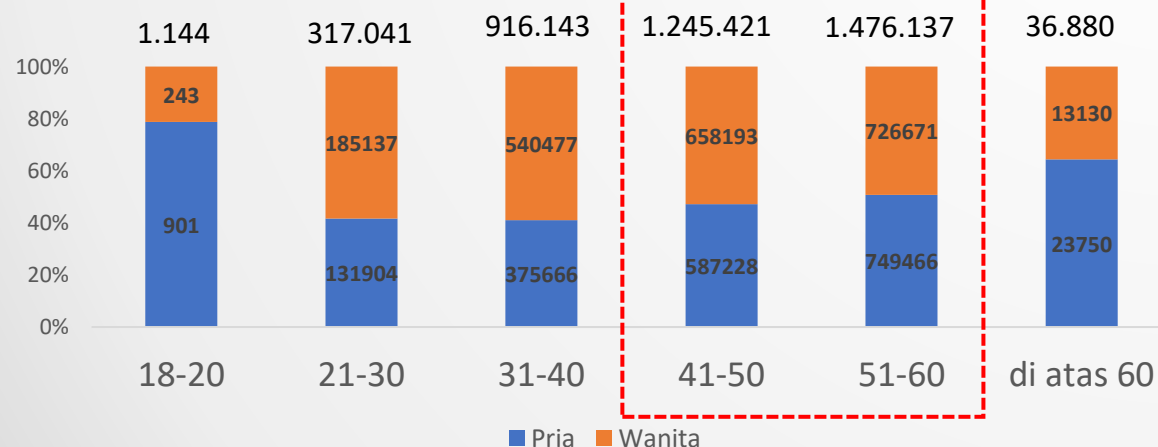


Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan ASN negatif

Pertumbuhan ASN

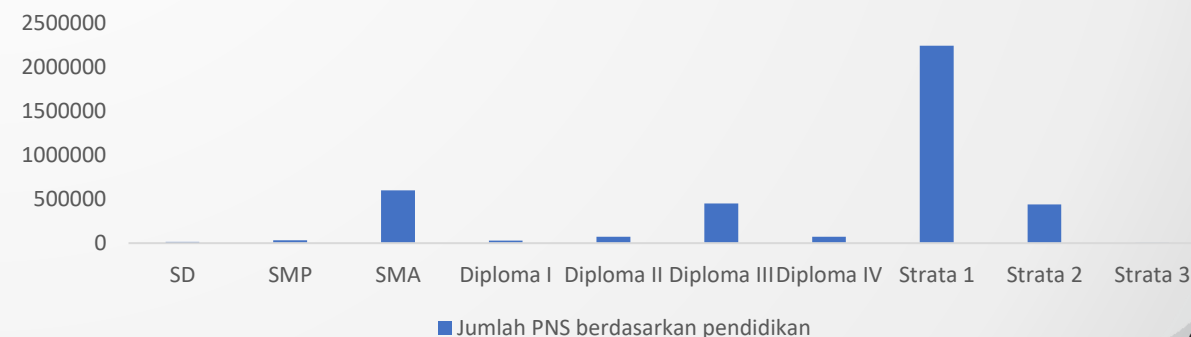


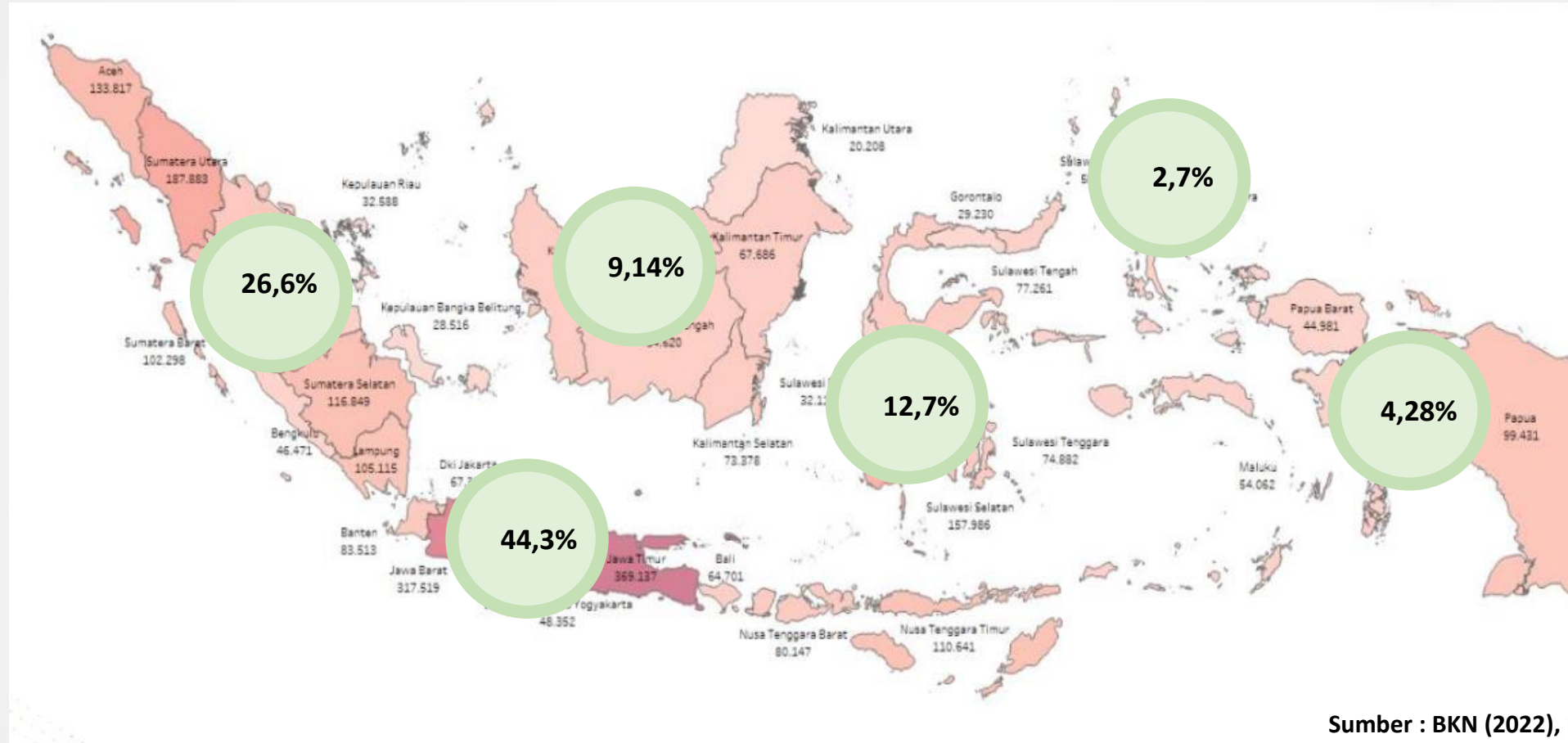
ASN didominasi pada usia menjelang pensiun



Pendidikan PNS terbanyak adalah Strata 1

Jumlah PNS berdasarkan pendidikan



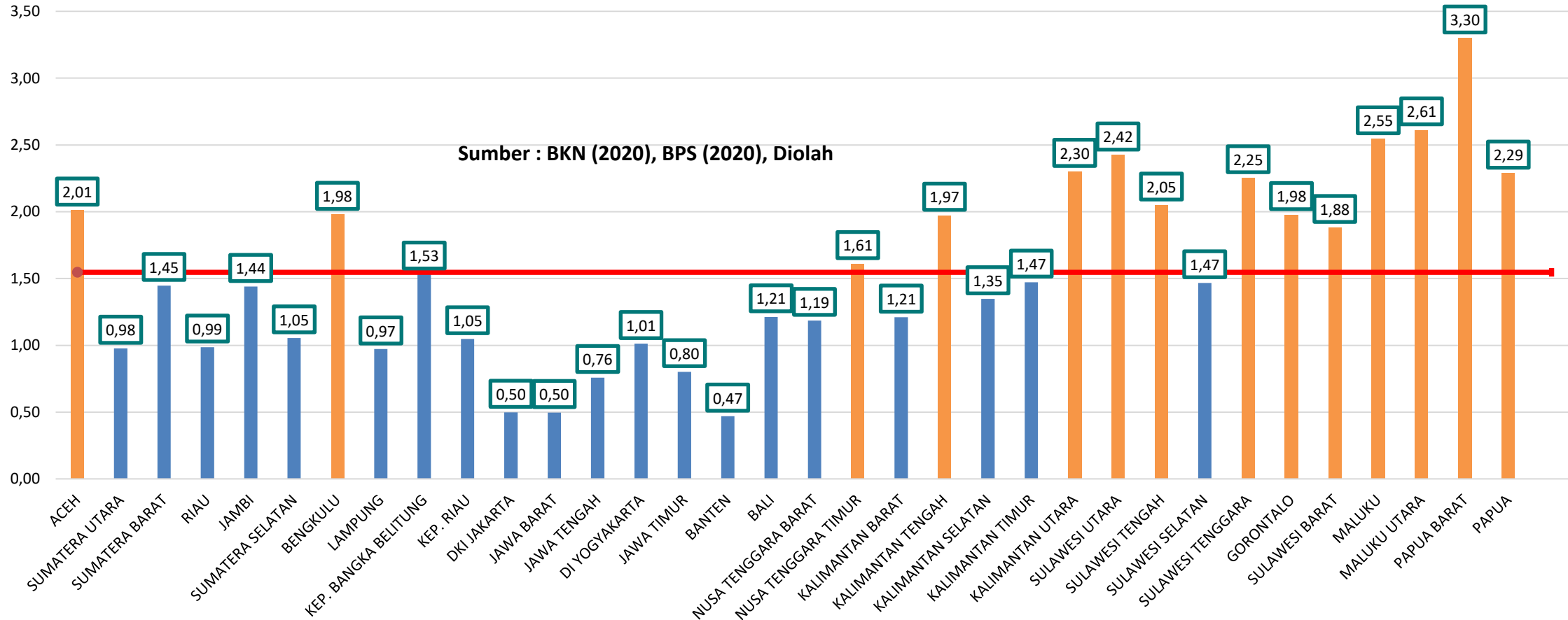


- ❑ Sebaran PNS secara mayoritas berada di Pulau Jawa dan Sumatera dengan proporsi sebanyak 70,9%.
- ❑ Distribusi ASN masih menjadi **issue yang perlu** dikaji -> Berdasarkan Resntra BKN 2024, terdapat kesenjangan antar kualitas dan jumlah ASN di Kota Besar dengan Desa sehingga tidak mengakomodasi kebutuhan pembangunan.

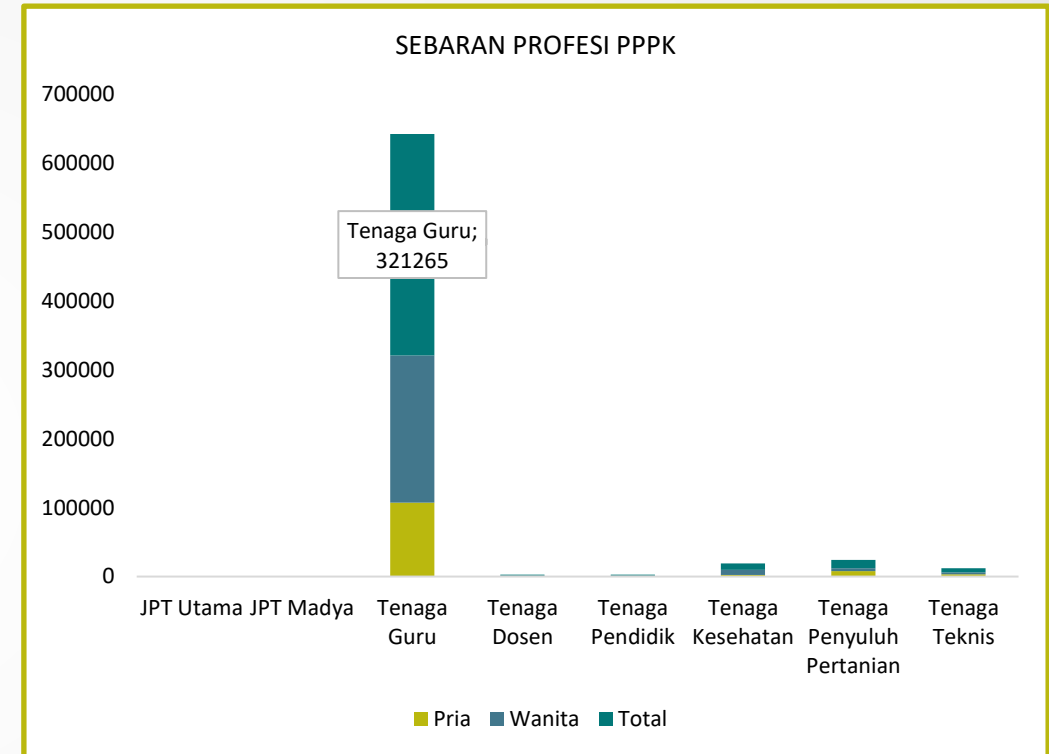
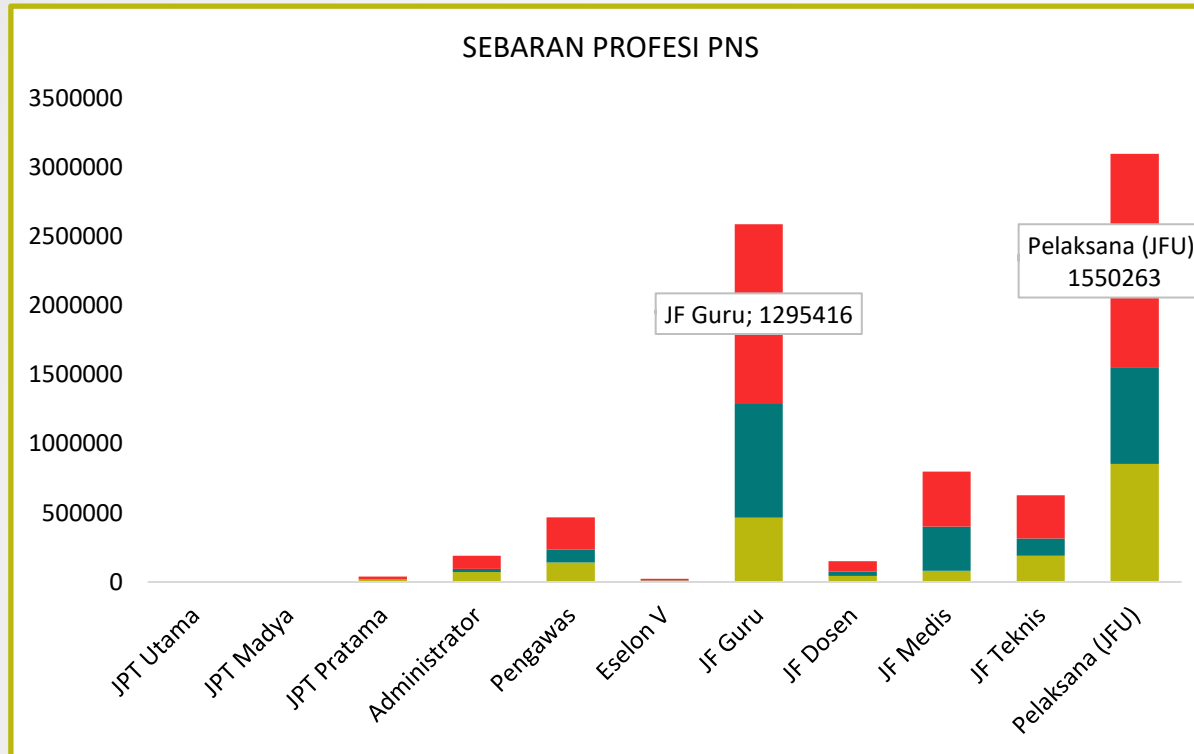
RASIO JUMLAH PENDUDUK/RASIO APARATUR SIPIL NEGARA



RASIO JUMLAH PENDUDUK / RASIO PNS



- ❑ Proporsi sebaran per provinsi Penduduk/PNS di Papua memiliki Rasio yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, hal ini perlu mendapat asesmen khusus atas kebutuhan pegawai di Provinsi yang memiliki rata-rata rasio yang lebih tinggi dari Nasional
- ❑ DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten memiliki Rasio tiga terendah hal ini perlu dilakukan benchmark terhadap 3 Provinsi ini

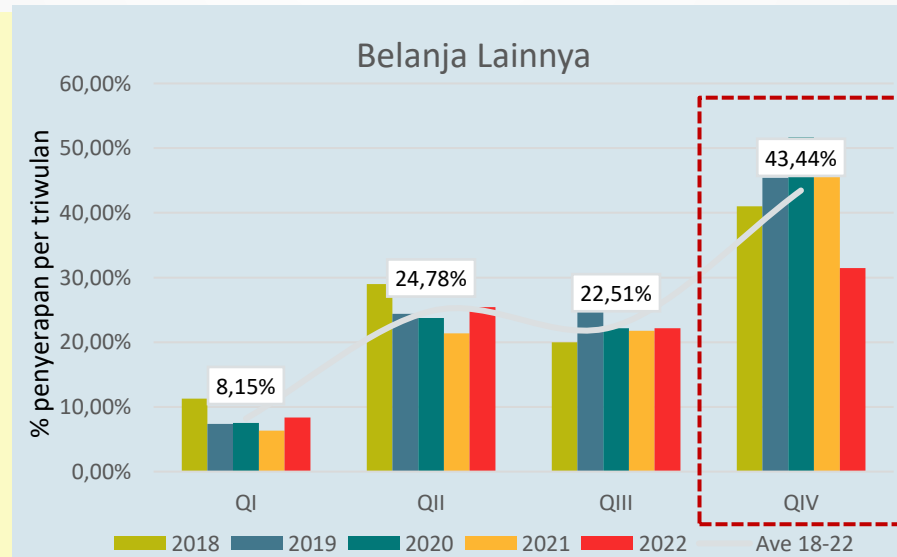
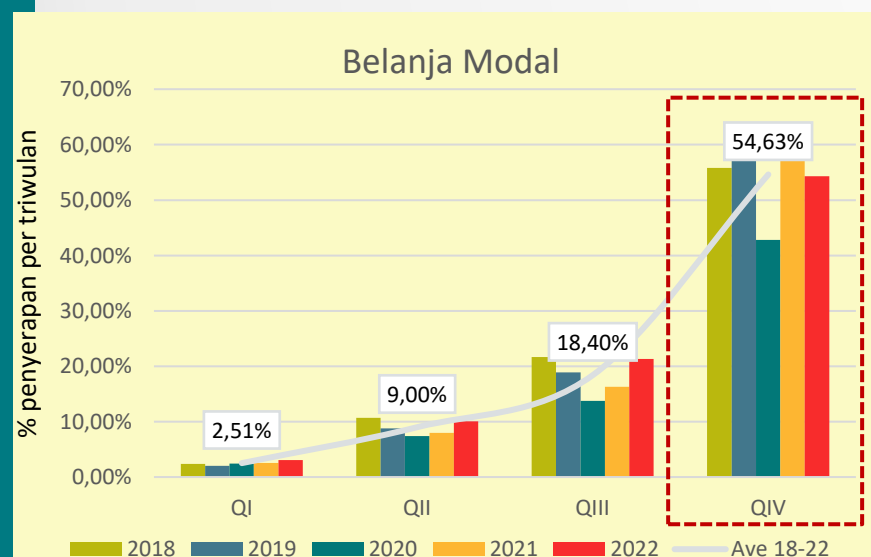
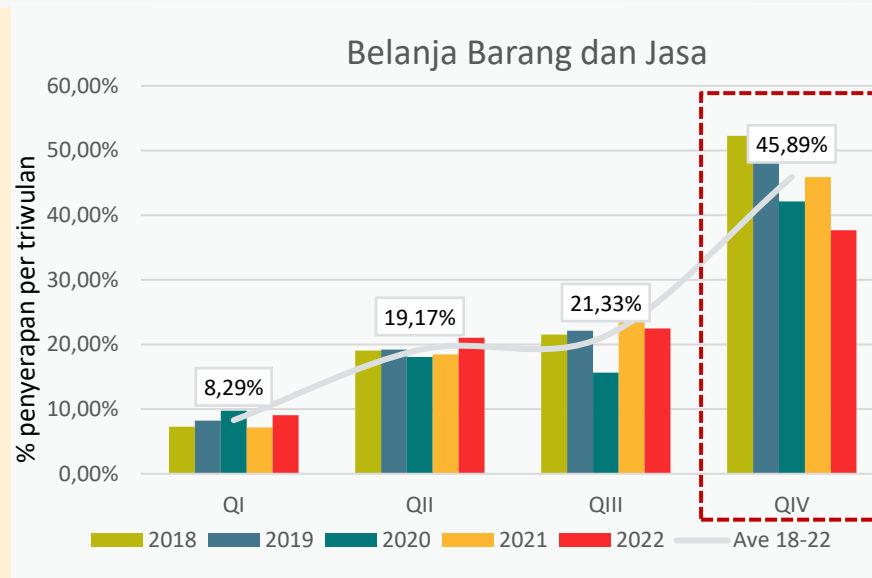
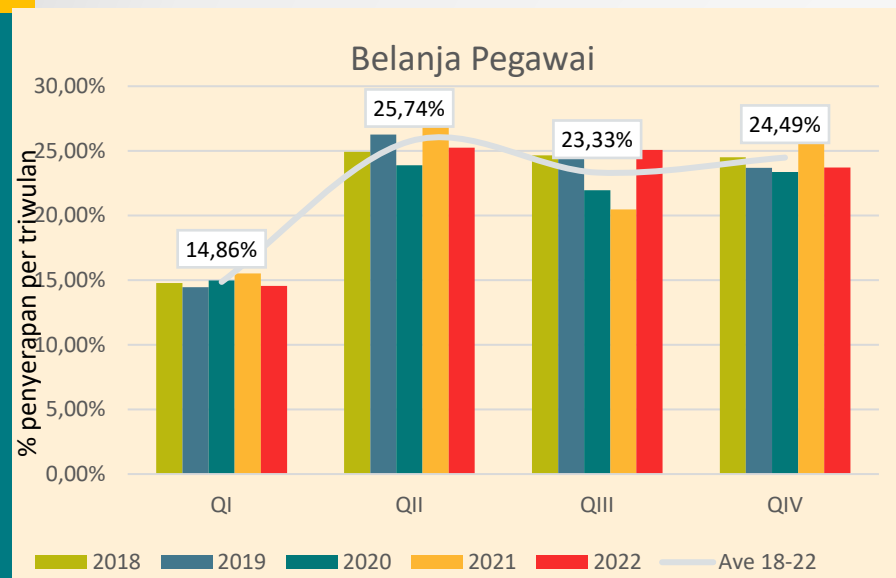


Sumber : BKN (2022), Diolah

- ❑ Pada tahun 2022, Profesi PPPK didominasi oleh guru sebesar 91% sementara PNS hanya sebesar 32%. PNS didominasi oleh Jabatan Fungsional Pelaksana (38%), sementara untuk jabatan dengan formasi yang paling sedikit adalah JPT Utama (Eselon I), Madya (Eselon II) dan Pratama (Eselon III) hal ini sejalan dengan hierarkis jabatan di masing-masing Kementerian Lembaga.
- ❑ Namun demikian, berdasarkan peta strategis pemerintah (Kementerian PAN RB beserta BKN) telah melakukan berbagai pendekatan untuk memangkas jabatan structural untuk digantikan dengan fungsional.
- ❑ Pergantian menuju jabatan Fungsional akan memangkas 39 ribu jabatan structural Eselon III dan IV

KUALITAS SDM MEMPENGARUHI SERAPAN BELANJA DAERAH

Lambatnya penyerapan belanja pada Triwulan I s.d. III mempengaruhi optimalisasi belanja tahunan



- Pola serapan belanja daerah secara triwulanan relatif sama setiap tahunnya.
- Pola penyerapan Belanja Modal, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Lainnya masih terfokus pada Q4.
- Belanja Modal menjadi jenis belanja dengan lonjakan realisasi tertinggi pada Q4.
- Rendahnya realisasi Belanja Modal pada Q1-Q3 disebabkan oleh permasalahan pelaksanaan tender di daerah dan *behaviour* pencairan kegiatan proyek pada akhir tahun.
- Tidak seimbangya realisasi triwulanan dapat menyebabkan rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah sehingga kurang mendorong peningkatan perekonomian daerah.

BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR



REFORMASI BIROKRASI

Upaya Pemerintah **mempercepat *good governance*** melalui perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah untuk menciptakan birokrasi yang professional.

Area Reformasi Birokrasi	Target Hasil
1. Organisasi	<i>Right sizing</i>
2. Tata Laksana	Prinsip <i>Good Governance</i>
3. Peraturan Perundangan	Kondusif dan tidak <i>overlapping</i>
4. SDM Aparatur	Integritas, kompeten, profesional, kinerja tinggi, dan sejahtera
5. Pengawasan	Penyelenggaraan Pemerintahan Bersih
6. Akuntabilitas	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7. Pelayanan Publik	Pelayanan prima
8. Pola Pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>cultural set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi

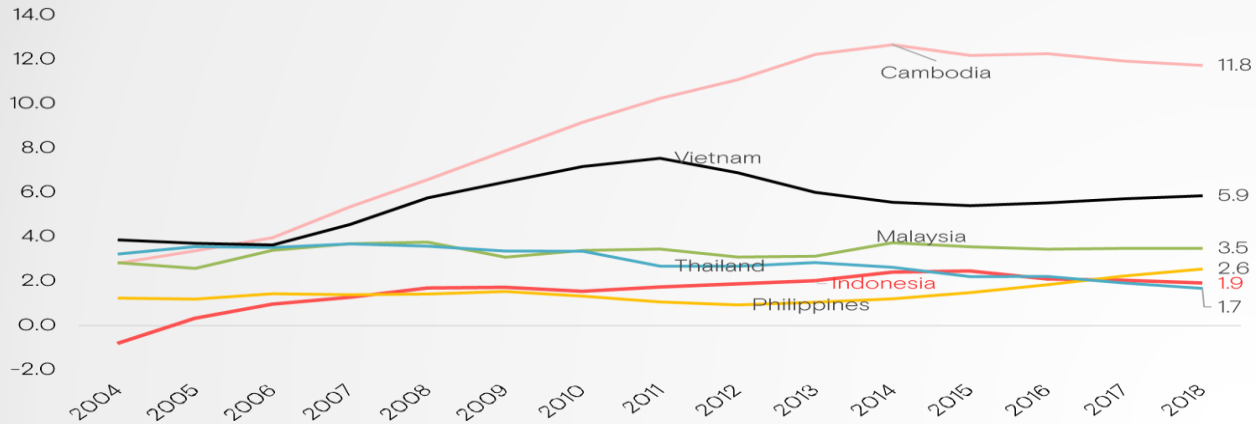
TINGKAT
KEPERCAYAAN
PUBLIK
MENINGKAT

MENDORONG
PENINGKATAN
INVESTASI DAN
EKSPOR

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN IKLIM INVESTASI INDONESIA

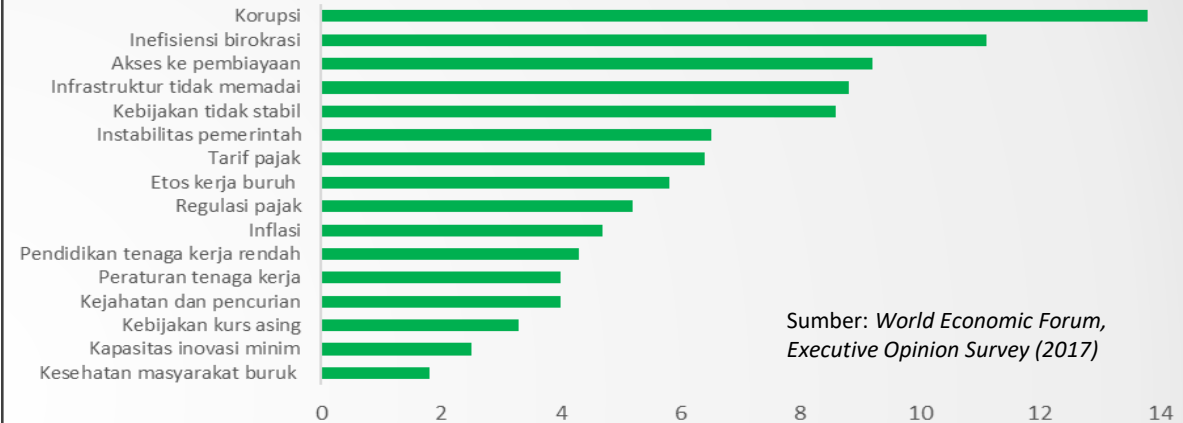


Perkembangan PMA Asia Tenggara



Sumber: World Bank

Faktor Penghambat Investasi



Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (2017)

Perbandingan Investasi Indonesia - Vietnam

Indonesia		Vietnam
2,1%	Rata-rata rasio investasi asing terhadap PDB (2010-2018)	5,9%
21% (2013) → 19,9% (2018)	Nilai tambah manufaktur terhadap PDB	13,3% (2013) → 16% (2018)
6,6	ICOR (2019)	4,6
6300	Jumlah regulasi terkait investasi	4000
Rp2,5 miliar	Modal pertama yang disetor	Tidak ada (kecuali usaha padat modal)
25% & 10%	PPH Badan & PPN	20% & 10%
5-20 tahun (tergantung nilai investasi)	Pembebasan pajak	2-4 tahun (tergantung lokasi, jenis industry, nilai investasi)
50% PPh Badan (2 tahun)	Pemotongan pajak (setelah masa pembebasan habis)	10-50% PPh Badan (5-15 tahun atau selamanya)

Sumber: World Bank

- Indonesia masih belum menjadi tujuan utama investor untuk melakukan investasi
- Banyak perusahaan asing yang merasa terlalu beresiko untuk melakukan PMA di Indonesia dan lebih memilih untuk melakukannya di negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja
- Pelaku bisnis mengungkap sejumlah faktor utama penghambat investasi di Indonesia dengan **Korupsi** menempati posisi pertama yang diikuti **Inefisiensi Birokrasi** dan **Akses ke Pembiayaan**
- Membandingkan dengan Vietnam yang menjadi tempat favorit PMA, panjangnya alur regulasi, besaran tarif, dan insentif pajak juga menjadi pertimbangan pengusaha menanamkan modal

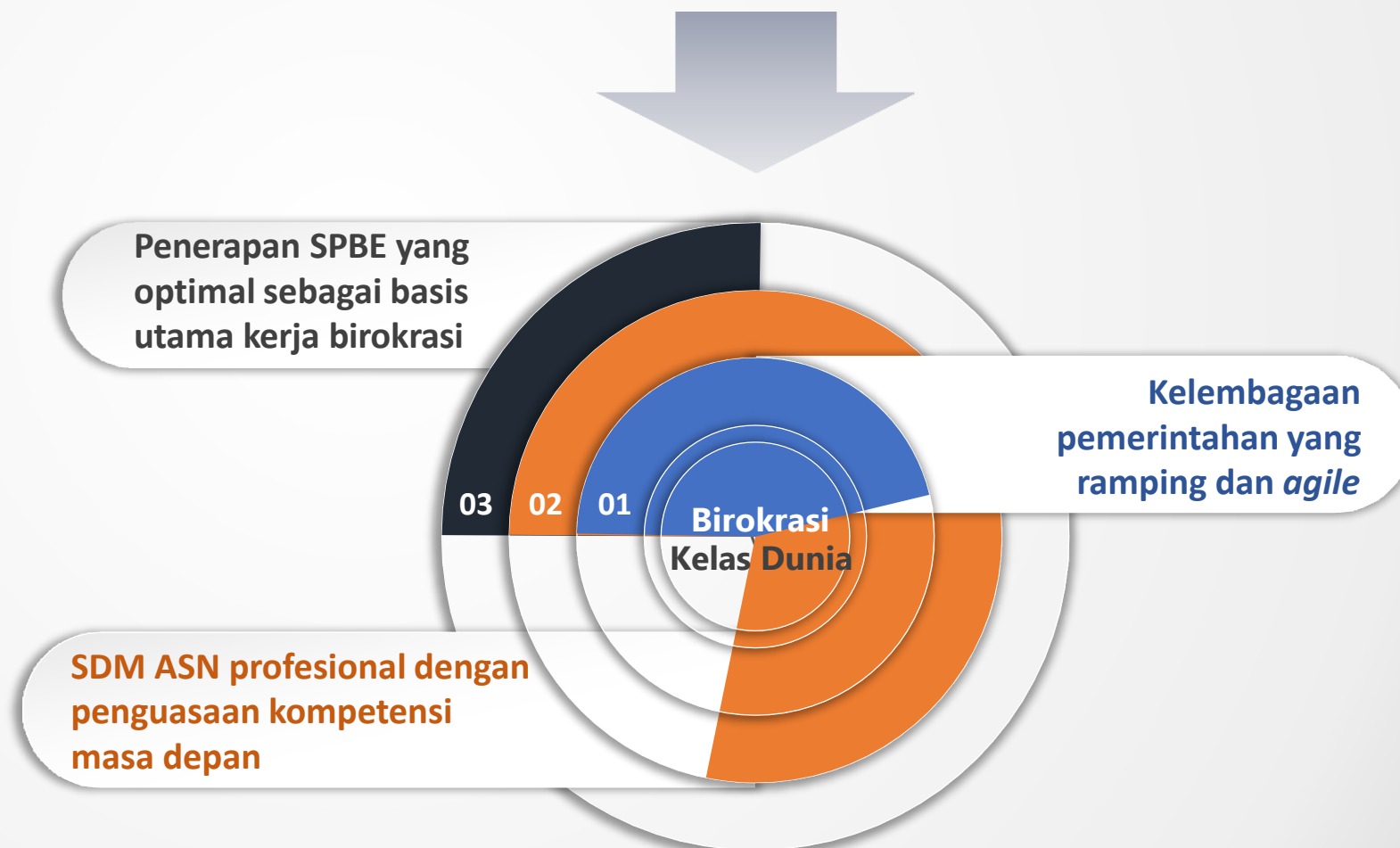
Memperkuat Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) sebagai hal *embedded* dalam menguatkan kapasitas Negara

Upaya RB harus didudukkan sebagai **hal yang terinternalisasi** dalam organisasi dan **menjadi kegiatan *mainstreaming*** untuk mendorong transformasi birokrasi dan **penguatan kapasitas negara;**

Maka, RB lebih fokus didorong melalui **strategi *total reward*** yang dibarengi dengan **penguatan manajemen kinerja organisasi pada fokus area, yang paralel dengan rekognisi bagi instansi yang berhasil melaksanakan RB.**

Tujuan akhir RB harus diarahkan untuk mewujudkan:

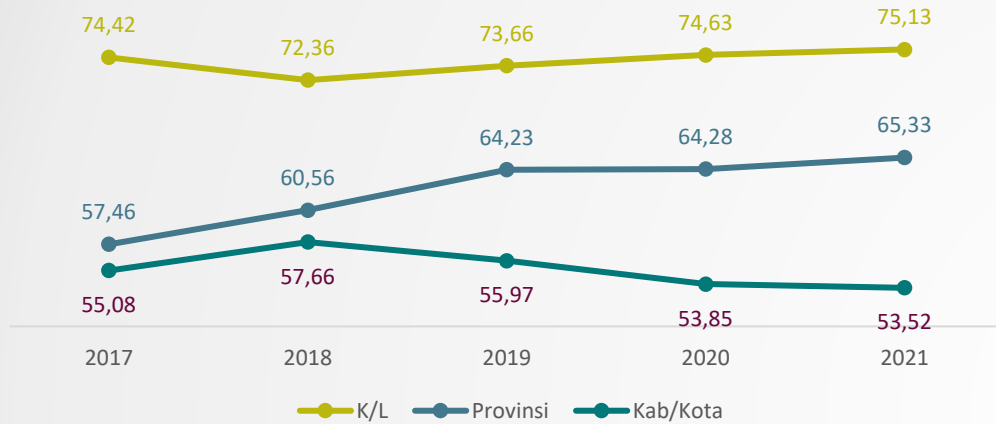


REFORMASI BIROKRASI HARUS DIPERKUAT

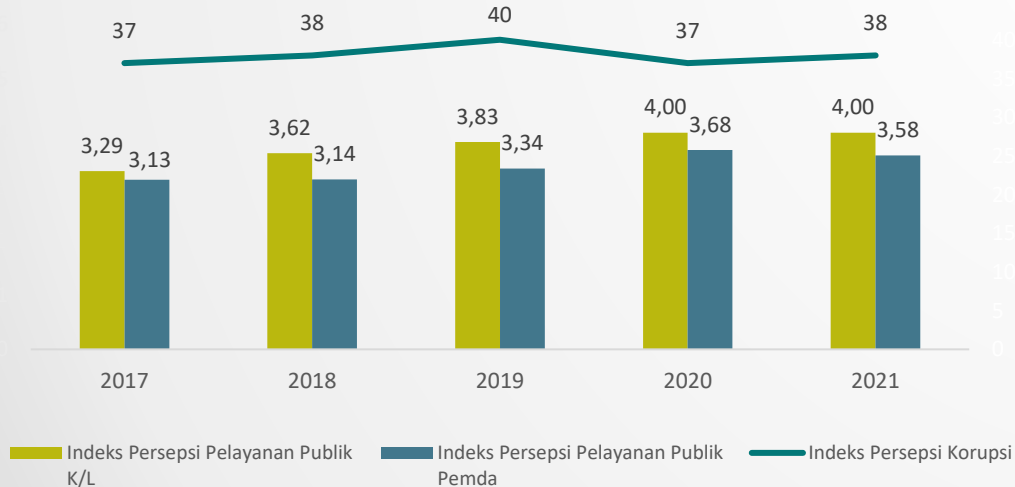
Mendorong pemerintahan publik di Indonesia berkelas dunia



Perkembangan Kualitas Layanan Publik



Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi



Evaluasi Perkembangan Indikator Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan kualitas, namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan terutama pada tingkat kab/kota dalam memberikan pelayanan yang cepat, murah, dan mudah.
2. Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2021 dilakukan pertama kali kepada seluruh K/L dan pemda (33 prov, 514 kab/kota) dengan nilai "baik". Pelaksanaan pelayanan publik di sebagian daerah masih terkendala sistem informasi yang responsive.
3. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat 1 poin dari 37 (2017) menjadi 38 (2021). Indeks persepsi Korupsi Indonesia tahun 2021 berada pada peringkat 96 dan masih di bawah Timor-Leste (82), Malaysia (62), Singapura (4).

Tantangan dan Permasalahan

1. Profesionalisme ASN: sistem merit, jabatan fungsional, kompetensi, sistem kesejahteraan dan pensiun ASN
2. Kelembagaan: *overlapping* tugas dan fungsi antarlembaga pemerintahan
3. Pelayanan publik: integrasi proses bisnis, pemanfaatan data terpadu
4. Akuntabilitas : sistem pengendalian internal, manajemen kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu, sistem integritas

Strategi Reformasi Birokrasi

1. Penyederhanaan Birokrasi
2. Tatalaksana Birokrasi Pemerintah
3. Pembangunan ASN yang Profesional
4. Birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani
5. Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Kementerian Keuangan RI
Gedung Djuanda I,
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

kemenkeu.go.id





Inovasi dikembangkan melalui Reformasi Birokrasi dengan pengembangan **new way of working, budaya kerja lebih kolaboratif dengan adanya joint program. Serta pengelolaan SDM dan Kehumasan yang terintegrasi**



“Kementerian Keuangan relatif sebagai institusi yang mengadopsi, beradaptasi dan bahkan menggunakan teknologi digital dalam berbagai inovasi termasuk dalam pelayanan publik”

Inovasi Pengelolaan Aset

1

- Kajian kebijakan pengelolaan asset di DKI Jakarta sebagai transisi IKN
- Peluncuran Aplikasi Optimalisasi asset negara (AEISA)

3

Data-driven Organization

- DA optimalisasi BMN untuk memberikan rekomendasi nilai sewa ATM
- Prototype dasbor makro finansial
- Aplikasi pemantauan dampak peraturan PPS
- DA PNBPN Minerba
- DA Smart-post Clearance Control

Penguatan Fungsi Kewilayahan

2

- Pengembangan Dasbor RCE pada EIS
- Paket Kebijakan Kemenkeu Kewilayahan dalam rangka penguatan sinergi dan peran fungsi dalam Regional Chief Economist dan sinergi UMKM

4

Penyederhanaan proses bisnis

- Integrasi Back office guna pembayaran gaji dan tunjangan kinerja (890 menjadi 1 satker)
- Pembuatan Aplikasi E-Perjadin yang terintegrasi end-to-end hingga memangkas 80% waktu pengerjaan

Inovasi senantiasa dilakukan dan menjadi bagian dalam budaya Kinerja Kementerian Keuangan senantiasa melakukan perubahan untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi kerja melalui adaptasi sesuai perkembangan teknologi terkini